
**DETERMINAN FAKTOR PENCEGAHAN FRAUD PADA INSPEKTORAT KOTA
JAYAPURA**

Hanum Hadharoh Nakiya

hadharohnakiyahhanum@gmail.com

Syaikhul Falah

sehufalah@gmail.com

Ulfah Rizky Muslimin

ulfahlud@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Binis Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of public sector audit, internal auditor competence and organizational justice on fraud prevention at the Jayapura City Inspectorate. The population of this study are employees at Jayapura City Inspectorate office. Sources of data in this study are primary data, which data or information obtained directly through the distribution of questionnaires. The measurement scale used by questionnaire in likert scale. The sampling technique used in this research is simple random sampling. The number of samples used are 52 samples. Data analysis in this study was carried out quantitatively, using multiple linear regression statistical tools (Multiple Linear Regression) with SPSS 26 statistical software. The results obtained are public sector audit implementation, internal auditor competence, organizational justice have a significant effect on fraud prevention at the Jayapura City Inspectorate

Keywords: *implementation of public sector audit; internal auditor competence; organizational justice; and fraud prevention*

1. PENDAHULUAN

Audit Sektor Publik merupakan salah satu bidang akuntansi sektor publik. Pelaksana audit dalam bidang pemerintah dikenal sebagai audit sektor publik. Tujuan melakukan audit sektor publik yaitu untuk memastikan akuntabilitas publik dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat. Audit kinerja secara independen melakukan penilaian efisiensi ekonomi dan operasional, efektifitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang berlaku untuk melakukan kesesuaian antara pencapaian kinerja untuk standar tertentu. Oleh karena itu, proses sistematisnya yaitu untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif serta mengomunikasikan hasil kepada pengguna laporan tersebut (Ulum, 2009).

Banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak terlepas dari tindakan kecurangan ataupun fraud yang juga semakin meluas dan berkembang. Di lingkungan pemerintah sendiri pun sering terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok. Dari lingkungan pemerintahan pusat sampai lingkungan pemerintah daerah sering terjadi tindakan kecurangan atau fraud seperti tindakan korupsi dan kolusi seperti memanipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan yang akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain (Furqani & Hafidhah, 2015).

Kecurangan (fraud) adalah perbuatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu baik di dalam maupun dari luar organisasi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang secara langsung ataupun tidak langsung akan merugikan pihak lain. Salah satu metode pencegahan fraud yang paling efektif adalah dengan memperbaiki sistem pengendalian internal (internal control system) selain struktur atau mekanisme pengendalian internal. Dalam hal tersebut, kepemimpinan organisasi merupakan tanggung jawab utama dari pengendalian internal. Sebagai bagian

dari pencegahan fraud, terdapat berbagai upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud. Jika terjadi kecurangan, dampak yang dihasilkan diharapkan dapat diminimalisir.

Pada saat ini penerapan otonomi daerah dimana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk pengelolaan daerahnya secara mandiri dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta transparansi agar tidak terjadi kecurangan. Memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas kepada masyarakat, seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah karena memiliki kekuasaan dan kewenangan. Namun kenyataannya, terkadang kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah tidak dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Bahkan adanya praktik korupsi di sektor publik yang tentu saja akan menciptakan lingkungan kerja yang tidak kondusif akan sangat merugikan pihak-pihak tertentu.

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat 444 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara ditaksir Rp18,6 triliun telah ditindak oleh penegak hukum di Indonesia. Sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi tahun 2020 itu ditindak dengan Pasal 2 dan 3 UU tentang Tipikor mengenai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Di kota Jayapura sendiri, adanya fakta bahwa pemerintah kota Jayapura kembali menerima opini keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-7 kalinya terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu penyusunan laporan keuangan belum berdasarkan proses konsolidasi, penatausahaan aset belum tertib, pengelolaan honorarium pegawai honorer tidak tetap pada dinas lingkungan hidup dan kebersihan tidak tertib, penambahan pekerjaan sebagai kompensasi kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifik tidak sesuai ketentuan <http://humas.jayapurakota.go.id>. Beberapa hal tersebut bisa jadi indikasi adanya kecurangan ataupun ketidaksesuaian dengan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut COSO dalam (Amrizal, 2004), pencegahan *fraud* (kecurangan) adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain dalam perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu: Efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut (Eliza, 2015) kecurangan merupakan upaya penipuan yang disengaja, untuk mengambil harta orang lain. *Fraud* dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana, antara lain pencurian, penggelapan aset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau penyembunyian fakta, rekayasa fakta dan juga termasuk korupsi.

Berdasar hal tersebut, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* adalah audit sektor publik. Menurut Riduwan (2007), audit sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Auditornya adalah auditor pemerintah. Pernyataan ini dapat didukung oleh kajian (Ambarwati, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh implementasi audit sektor publik dalam pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kota Jayapura.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali penelitian yang meneliti tentang implementasi audit sektor publik dalam pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kota Jayapura. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh audit sektor publik, kompetensi auditor internal dan keadilan organisasional secara parsial dan simultan terhadap pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kota Jayapura.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keadilan

Teori keadilan yang di kemukakan oleh (John Rawls, 1921) dan di pakai oleh Greenberg (Nor, 2011) mengatakan bahwa teori keadilan dalam organisasi berawal dari pemahaman untuk menguji prinsip-prinsip interaksi sosial secara umum, bukan secara khusus pada organisasi Keadilan organisasional memfokuskan diri pada tiga isu utama untuk menilai istilah keadilan dalam organisasi. Ketiga isu yang dimaksud yaitu : hasil (*outcomes*), proses (*process*) dan interaksi antar personal (*interpersonal interactions*) (Cropanzano et., al, 2002). Penilaian yang berkaitan dengan kewajaran hasil atau kewajaran pengalokasian disebut dengan istilah keadilan *distributive* atau dengan kata lain keadilan distributif mengacu pada kewajaran yang diterima (Greenberg, 1990).

2.2 *Contingency Theory (Teori Kontijensi)*

Teori kontingensi yang di kemukakan oleh Lawrence dan Lorsch (1967) dan kemudian dikutip oleh Merchant (Rae, 2004) menyatakan bahwa tidak terdapat sistem pengendalian yang secara universal selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi dalam setiap keadaan. Sistem pengendalian akan berbeda-beda di tiap-tiap organisasi yang berdasarkan pada faktor organisatoris dan faktor situasional. Teori ini penting sebagai media untuk menerangkan perbedaan dalam struktur organisasi. Teori kontigensi menggambarkan bahwa sistem pengendalian internal digunakan untuk memberikan motivasi kepada anggota organisasi agar bertindak dan dapat membuat keputusan secara konsisten sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem pengendalian internal juga merupakan alat kontrol dalam organisasi dan alat yang efektif dan bermanfaat untuk memprediksi konsekuensi ataupun penyimpangan yang mungkin terjadi pada berbagai aktivitas yang dilakukan.

2.3 Implementasi Audit Sektor Publik

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Prosesnya adalah seperti memantau kegiatan harian dalam kebijakan, penilaian kegiatan dan kepuasan klien dengan layanan yang diberikan. Sedangkan audit sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Auditorinya adalah auditor pemerintah (Riduwan, 2007).

Audit adalah suatu proses sistematis secara objektif penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada serta mengomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.4 Kompetensi Auditor Internal

Menurut (Ahmad, 2011), kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif dan objektif. Menurut (Mulyadi, 2002) mengukur kompetensi dapat menggunakan indikator sebagai berikut: Pengetahuan dan Pengalaman.

Kompetensi dalam hal ini adalah keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kompetensi auditor Inspektorat diukur dengan menggunakan sepuluh item pernyataan yang menggambarkan tingkat persepsi auditor terhadap bagaimana kompetensi yang dimilikinya terkait standar akuntansi dan audit yang berlaku, penguasaannya terhadap seluk beluk organisasi pemerintahan, serta program peningkatan keahlian. Kompetensi Pemeriksa diukur menggunakan sepuluh instrumen pertanyaan yang diadopsi dari penelitian (Efendy, 2011).

2.5 Keadilan Organisasional

Keadilan organisasional lebih menekankan pada kewajaran alokasi sumber daya, kewajaran proses pengambilan keputusan, dan kewajaran atas pemeliharaan hubungan antar pribadi atau informalinteraction antara karyawan yang menerima keputusan dengan pembuat keputusan. Variabel ini menggunakan sebelas item pertanyaan terkait dengan keadilan procedural dan keadilan distributif yang

diukur dari kebijakan dan peraturan organisasi, kejujuran, konsistensi, keetisan, keterwakilan, penghargaan dan tanggung jawab kerja. Peneliti menggunakan empat item pertanyaan terkait dengan keadilan organisasi yang di kutip dari (Lisa, 2013).

2.5 Pencegahan *Fraud* (Kecurangan)

Tugas utama auditor internal adalah untuk mencegah penipuan lebih mudah untuk diatasi daripada setelah penipuan terjadi. Pada dasarnya, ketika pengendalian internal tidak ada atau tidak memadai, perusahaan lebih mungkin untuk melakukan kecurangan. Karyawan akan dipekerjakan secara tidak sukarela jika hal ini dilakukan secara keliru dan tidak efisien. Personil mereka diatur, dieksploitasi secara tidak adil, dan disalahgunakan karena kejujuran dan integritas mereka atau memberi banyak tekanan pada anda untuk memenuhi tujuan keuangan anda. Karyawan yang memimpin penipuan memiliki masalah pribadi yang tidak dapat mereka tangani atau atasi, seperti kesulitan keuangan, masalah kesehatan keluarga, dan sebagainya (Bastian, 2010).

2.6 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori di atas maka dalam penelitian ini hipotesis yang akan diuji kebenarannya adalah sebagai berikut:

Implementasi Audit Sektor Publik terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan Teori keadilan yang di kemukakan oleh (John Rawls, 1921) dan di pakai oleh Greenberg (Nor, 2011) mengatakan bahwa teori keadilan dalam organisasi berawal dari pemahaman untuk menguji prinsip-prinsip interaksi sosial secara umum, bukan secara khusus pada organisasi. Keadilan organisasional memfokuskan diri pada tiga isu utama untuk menilai istilah keadilan dalam organisasi.

Adapun peneliti terdahulu yang meneliti tentang implementasi audit sektor publik terhadap pencegahan fraud adalah (Ambarwati, 2013). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi audit sektor publik berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Implementasi audit sektor publik dalam pencegahan *fraud* pada inspektorat dapat menimbulkan semangat kompetitif bagi setiap karyawan dan karyawatnya, memberikan gairah untuk selalu mempertajam pemahaman, aplikasi dan regulasi yang berhubungan dengan fraud. Kedua, memberikan rasa bangga dengan andil ikut mencegah, mengawasi dan memeriksa adanya indikasi ataupun pelanggaran dalam hal fraud sektor publik (Inspektorat, 2012). Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Implementasi Audit Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*

Kompetensi Auditor Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan Teori keadilan yang di kemukakan oleh (John Rawls, 1921) dan di pakai oleh Greenberg (Nor, 2011) mengatakan bahwa teori keadilan dalam organisasi berawal dari pemahaman untuk menguji prinsip-prinsip interaksi sosial secara umum, bukan secara khusus pada organisasi. Keadilan organisasional memfokuskan diri pada tiga isu utama untuk menilai istilah keadilan dalam organisasi.

Adapun peneliti terdahulu yang meneliti tentang kompetensi auditor internal terhadap pencegahan fraud adalah Kharie. et al, (2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini dikarenakan tuntutan bagi auditor yang melakukan aktivitas audit harus memiliki kompetensi yang memadai terkait aktivitas audit, dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor diukur dari pengetahuan dan juga pengalaman dalam melakukan audit. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kompetensi Auditor Internal berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*

Keadilan Organisasional Terhadap Pencegahan *Fraud*

Teori yang di kemukakan oleh (John Rawls, 1921) dan di pakai oleh Greenberg (Nor, 2011) mengatakan bahwa teori keadilan dalam organisasi berawal dari pemahaman untuk menguji prinsip-prinsip interaksi sosial secara umum, bukan secara khusus pada organisasi. Secara umum, keadilan digambarkan sebagai situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi (Lind and Tyler, 1988). Niehoif and Moorman, (1953) dalam Kharie, et.al (2020) persepsi keadilan organisasi,

yang intensif menghasilkan prosedural dan kebijakan distribusi dalam tempat kerja sebagai strategi untuk memperkecil kecurangan karyawan dengan memastikan evaluasi kinerja karyawan dan proses yang bersifat adil dan membuat program perubahan agar dapat menghasilkan karyawan yang lebih baik melalui peningkatan pengendalian internal. Lebih lanjut, ketika keadilan organisasional dirasa rendah, maka karyawan/pegawai merasionalisasikan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang misalkan melakukan kecurangan karena mereka lebih seperti untuk membalas dendam ataupun melawan “keadilan”. Maka dari itu, perilaku-perilaku seperti itu dipandang sebagai macam-macam tipe dorongan dari perilaku orang-orang yang menyimpang pada tempat kerja yang mana termasuk perilaku-perilaku langsung ke organisasi seperti (kelambanan, ketidakhadiran, pengrusakan dan pencurian) (Kharie. et al, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Keadilan Organisasional berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*

Audit Sektor Publik, Kompetensi Auditor Internal, dan Keadilan Organisasional Terhadap Pencegahan Fraud

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Prosesnya adalah seperti memantau kegiatan harian dalam kebijakan, penilaian kegiatan dan kepuasan klien dengan layanan yang diberikan. Sedangkan audit sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Auditornya adalah auditor pemerintah (Riduwan, 2007). Menurut (Ahmad, 2011), kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif dan objektif.

Menurut (Mulyadi, 2002) mengukur kompetensi dapat menggunakan indikator sebagai berikut: Pengetahuan dan Pengalaman. Keadilan organisasional lebih menekankan pada kewajaran alokasi sumber daya, kewajaran proses pengambilan keputusan, dan kewajaran atas pemeliharaan hubungan antar pribadi atau informal interaction antara karyawan yang menerima keputusan dengan pembuat keputusan. Hal ini dapat di dukung juga dengan kajian (Ilfan Bereki, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Audit sektor publik, kompetensi auditor internal dan Keadilan Organisasional berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud.

H₄ : Audit Sektor Publik, Kompetensi Auditor Internal, dan Keadilan Organisasional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah pegawai pada kantor Inspektorat Kota Jayapura sebanyak 38 pegawai sehingga total populasi sebanyak 38 orang, dengan menggunakan teknik pengumpulan sampel penelitian melalui *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2001), teknik *simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Selain itu, jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.

3.2 Variabel dan Definisi Operasional

3.2.1 Variabel Dependen

Pencegahan Fraud

Aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 tujuan pokok yaitu : keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku” (Bharanti. et al., 2020) Indikator dan alat ukur yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi: 1) Merekrut dan mempromosikan karyawan yang tepat; 2) Pelatihan; 3) Disiplin; 4) Mengidentifikasi dan mengukur resiko kecurangan. Skala pengukuran menggunakan skala interval, dengan interval dari 1 sampai 5. Dimana skala 1 dinyatakan Sangat Tidak Setuju; 2 dinyatakan Tidak Setuju; 3 dinyatakan Netral; 4 dinyatakan Setuju; 5 dinyatakan Sangat Setuju.

3.2.2 Variabel Independen

Audit Sektor Publik

Pengujian sistematis, teorganisasi, dan objektif atas suatu entitas untuk menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif dalam memenuhi harapan stakeholder dan memberikan rekomendasi guna peningkatan kinerja (Ambarwati, 2013). Indikator dan alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Maksud dan Ruang Lingkup; 2) Kesesuaian dengan standar profesi; 3) Pengetahuan dan kecakapan; 4) Pendidikan berkelanjutan; 5) Ketelitian profesionalisme. Variabel audit sektor publik dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan kuesioner dari (Nurfasila, 2022). Responden akan diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan menggunakan skala likert dengan interval dari 1 sampai 5. Skala 1 dinyatakan Sangat Tidak Setuju; 2 dinyatakan Tidak Setuju; 3 dinyatakan Netral; 4 dinyatakan Setuju; 5 dinyatakan Sangat Setuju

Kompetensi Auditor Internal

Menurut (Ahmad, dkk 2011) kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif dan objektif. Indikator dan alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) Pengetahuan; 2) Pengalaman. Variabel kompetensi auditor internal dalam penelitian ini diukur menggunakan pertanyaan kuesioner dari (Haryoto, 2015). Skala pengukuran menggunakan skala likert 5 poin. Jawaban pertanyaan diukur menggunakan skala likert dengan Interval 1 sampai 5. Skala 1 dinyatakan Sangat Setuju; 2 dinyatakan Setuju; 3 dinyatakan Netral; 4 dinyatakan tidak Setuju; 5 dinyatakan Sangat tidak Setuju

Keadilan Organisasi

Keadilan organisasi (*organizational justice*) adalah istilah untuk mendeskripsikan kesamarataan atau keadilan di tempat kerja yang berfokus bagaimana para pekerja menyimpulkan apakah mereka diperlakukan secara adil dalam pekerjaannya dan bagaimana kesimpulan tersebut kemudian mempengaruhi variabel-variabel lain yang berhubungan dengan pekerjaan Khatri, et al (Mariani, 2011). Indikator dan alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1) keadilan *distributive*; 2) keadilan *procedural*; 3) keadilan *interaksional*. Variabel keadilan organisasi dalam penelitian ini diukur menggunakan pertanyaan kuesioner dari (Anastasia, 2017). Skala pengukuran menggunakan skala likert dengan Interval, 1 sampai 5. Skala 1 dinyatakan Sangat Tidak Setuju; 2 dinyatakan Tidak Setuju; 3 dinyatakan Netral; 4 dinyatakan Setuju; 5 dinyatakan Sangat Setuju.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengkaji data dengan teknik analisa, dengan menggunakan pemikiran secara logis dan rasional dalam mendekati informasi yang hasilnya mendukung terhadap analisa data. Analisa ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, sementara alat uji yang digunakan untuk menguji data adalah *Software Statistical Package for Social Science (SPSS)* Versi 25.

Uji Kualitas Data

Dalam pengujian kuesioner, kriteria kuesioner yang baik adalah terlihat pada uji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner dengan mengukur nilai r hitung $>$ r tabel dengan tingkat signifikansinya 0,05. Jika demikian, maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Sedangkan untuk menguji reliabilitasnya akan dilakukan dengan uji statistik Cronbach's Alpha. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel jika menghasilkan nilai Cronbach's Alpha $>$ 0,70 (Ghozali, 2013).

Uji Asumsi Klasik

Pada Pengujian asumsi klasik, terdapat 3 uji yaitu: uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Pada uji normalitas untuk menguji apakah data yang diperoleh berdistribusi normal, maka dilakukan pengujian dengan cara ana-lisis statistik yaitu uji One sample kolmogorove-smirnov test. suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0,05 (sig. > 0.05). Pada uji multikolinieritas untuk membantu perhitungan digunakan penelitian tolerance dan *Variance Inflator Factor* (VIF) kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang di-jelaskan oleh variabel independen lainnya, jika *tolerance value* dibawah 0,10 atau 10 % atau nilai VIF adalah diatas 10 maka terjadi multikolinieritas, begitu juga sebaliknya. Sementara itu, uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik plot untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID, dengan menggunakan cara ini deteksi heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED (jika tidak ada pola yang jelas, serta titiktitik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas) (Ghozali, 2018).

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t test. Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini bias dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Apabila *p-value* < 5% maka hipotesis diterima dan apabila *p-value* > 5% maka hipotesis ditolak (Ghozali, 2018). Rancangan pengujian hipotesis ini untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) yaitu audit sektor publik (X1), kompetensi auditor internal (X2) keadilan organisasional (X3) terhadap variabel dependen (Y) yaitu pencegahan *fraud*. Pada peneltian ini terdapat 3 persamaan yang dibuat untuk melihat pengaruh antarvariabel. Pengujian hipotesis ini menggunakan program SPSS ver.25 yang di uji dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 5\%$). Persamaan regresi dapat dilihat pada model pengujian hipotesis dibawah ini :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e..... (1)$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner yang disebarkan secara *offline* kepada pegawai yang bekerja di Inspektorat kota Jayapura. Data beserta jawaban responden akan langsung terinput kedalam *microsoft excel* peneliti. Proses perizinan di mulai dari penyerahan surat penelitian dari fakultas ke Inspektorat kota Jayapura kemudian menunggu surat balasan untuk penyebaran kuesioner, dan melakukan penyebaran kuesioner secara *offline*. Dari 38 kuesioner yang disebarkan, total kuesioner yang kembali adalah 38 kuesioner yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Penyebaran Kuesioner

| | Jumlah(orang) | Presentase (%) |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Kuesioner yang disebar | 38 | 100% |
| Kuesioner yang tidak kembali | (0) | 0 |
| Kuesioner yang diolah | 38 | 100% |

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

4.2 Karakteristik Responden

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 38 responden diperoleh data tentang jenis kelamin responden. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Karakteristik Responden

| No | Keterangan | Jumlah | Persentase |
|----|-----------------------------------|--------|------------|
| 1 | Jenis Kelamin | | |
| | Laki-laki | 17 | 45% |
| | Perempuan | 21 | 55% |
| | Total | 38 | 100 % |
| 2 | Umur | | |
| | 21-30 | 9 | 24% |
| | 31-40 | 11 | 29% |
| | 41-50 | 10 | 26% |
| | 51-60 | 8 | 21% |
| | Total | 38 | 100% |
| 3 | Jabatan | | |
| | Inspektur | 1 | 3% |
| | Sekretaris | 1 | 3% |
| | Urban Pendapatan dan Kekayaan | 1 | 3% |
| | Urban Perekonomian | 1 | 3% |
| | Urban Kesejahteraan Sosial | 1 | 3% |
| | Urban Aparatur dan Pemerintahan | 1 | 3% |
| | Urban Investigasi | 1 | 3% |
| | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | 1 | 3% |
| | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | 1 | 3% |
| | Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan | 1 | 3% |
| | P2UPD Madya | 6 | 16% |
| | P2UPD Muda | 1 | 3% |
| | P2UPD Pertama | 1 | 3% |
| | JFA Madya | 1 | 3% |
| | JFA Muda | 5 | 13% |
| | JFA Pertama | 1 | 1% |
| | JFA Terampil | 1 | 1% |
| | Pelaksana | 12 | 32% |
| | Total | 38 | 100% |
| 4 | Pendidikan Terakhir | | |
| | SMA/SMK | 1 | 3% |
| | Diploma | 1 | 3% |
| | S1 | 27 | 71% |
| | S2 | 9 | 24% |
| | Total | 38 | 100% |
| 5 | Lama Bekerja | | |
| | 1-5 Tahun | 15 | 39% |
| | 6-10 Tahun | 10 | 26% |
| | 11-15 Tahun | 5 | 13% |
| | >15 Tahun | 8 | 21% |
| | Total | 38 | 100% |

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

4.3 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya kuesioner dengan mengukur nilai r hitung > r tabel dengan tingkat signifikansinya 0,05 maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil pengujian validitas data dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Hasil Pengujian Validitas X1

| Variabel | Item Pertanyaan | r hitung | r tabel | Sig | Keterangan |
|--------------------------------|--------------------|-------------|------------|------|------------|
| Audit Sektor Publik | X1.1 | 0,942 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X1.2 | 0,926 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X1.3 | 0,855 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X1.4 | 0,909 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X1.5 | 0,886 | 0.270 | 0,00 | Valid |

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua item pernyataan dari variabel Auditor Sektor Publik (X1) dapat dikatakan valid karena sudah ditemukan nilai r -hitung lebih besar dari nilai r -tabel yaitu 0,270 dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05

Tabel 4
Hasil Uji Validitas X2

| Variabel | Item Pertanyaan | r hitung | r tabel | Sig | Keterangan |
|--|--------------------|-------------|------------|------|------------|
| Kompetensi Auditor Internal | X2.1 | 0,891 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X2.2 | 0,887 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X2.3 | 0,807 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X2.4 | 0,818 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X2.5 | 0,779 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X2.6 | 0,928 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X2.7 | 0,702 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X2.8 | 0,770 | 0.270 | 0,00 | Valid |

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa semua item pernyataan dari variabel Kompetensi Auditor Internal (X2) dapat dikatakan valid karena sudah ditemukan nilai r -hitung lebih besar dari nilai r -tabel yaitu 0,270 dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas X3

| Variabel | Item Pertanyaan | r hitung | r tabel | Sig | Keterangan |
|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------|------------|
| Keadilan Organisasional | X3.1 | 0,821 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X3.2 | 0,839 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X3.3 | 0,775 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X3.4 | 0,767 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X3.5 | 0,738 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X3.6 | 0,770 | 0.270 | 0,00 | Valid |
| | X3.7 | 0,738 | 0.270 | 0,00 | Valid |

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua item pernyataan dari variabel Keadilan Organisasional (X3) dapat dikatakan valid karena sudah ditemukan nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel yaitu 0,270 dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05.

Tabel 6
Hasil Uji Validitas X4

| Variabel | Item Pertanyaan | r hitung | r tabel | Sig | Keterangan |
|---------------------|--------------------|-------------|------------|------|------------|
| Pencegahan Fraud | Y1.1 | 0,860 | 0,270 | 0,00 | Valid |
| | Y1.2 | 0,826 | 0,270 | 0,00 | Valid |
| | Y1.3 | 0,793 | 0,270 | 0,00 | Valid |
| | Y1.4 | 0,908 | 0,270 | 0,00 | Valid |

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua item pernyataan dari variabel Pencegahan Fraud (Y) dapat dikatakan valid karena sudah ditemukan nilai r-hitung lebih besar dari nilai r-tabel yaitu 0,270 dan nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05.

4.4 Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, pengujian dilakukan dengan menggunakan pengujian *cronbach alpha* (α). Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,7. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

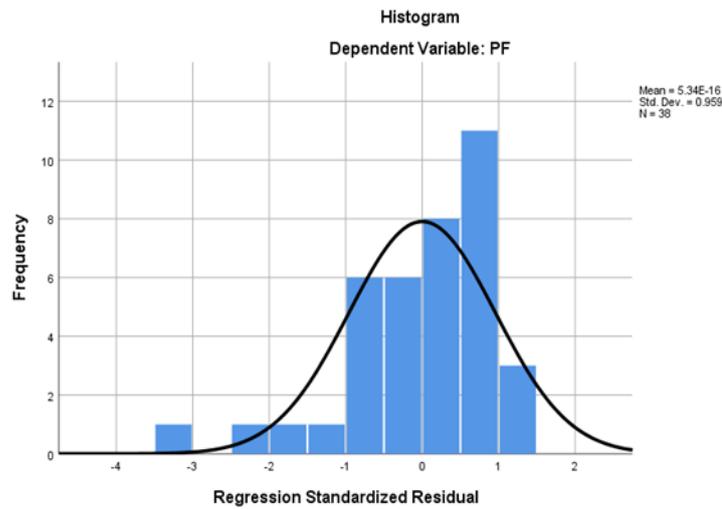
| NO | Variabel | Nilai <i>cronbach alpha</i> | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| 1. | Audit Sektor Publik | 0,944 | Reliabel |
| 2. | Kompetensi Auditor Internal | 0,931 | Reliabel |
| 3. | Keadilan Organisasional | 0,892 | Reliabel |
| 4. | Pencegahan Fraud | 0,869 | Reliabel |

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0.6. Nilai *cronbach alpha* keseluruhan item lebih besar dari 0.6 berarti bahwa semua variabel realibel sehingga layak untuk dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

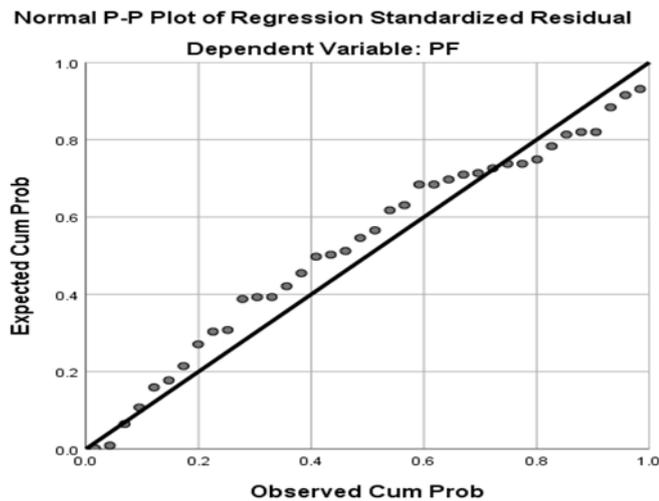
4.5 Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk melihat distribusi data residual dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian apakah normal atau tidak. Terdapat dua cara untuk mengetahui hal tersebut, yaitu dengan cara analisis grafik dan analisis statistik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan cara melihat grafik histogram dan P=P plot. Berikut ini adalah grafik histogram dan P-P plot yang didapatkan dari hasil pengujian dan penelitian.



Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Gambar 1
Grafik Histogram



Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Gambar 2
Grafik P-P Plot

Berdasarkan analisis grafik histogram, dapat dilihat bahwa batang histogram mengikuti pola kurva normal sehingga dapat dikatakan bahwa residual data terdistribusi normal. Hal tersebut juga didukung oleh analisis grafik P-P plot yang menunjukkan plot data yang tersebar mengikuti garis linear dan tersebar jauh dari garis tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

4.6 Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel independen dan dependen, ketentuan uji multikolinieritas ini adalah jika nilai $VIF < 10$ dan nilai tolerance > 0.10 maka tidak terdapat multikolinieritas yang terjadi antar variabel. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|-----|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | ASP | 0,119 | 8,411 |
| | KAI | 0,117 | 8,553 |
| | KO | 0,952 | 1,050 |

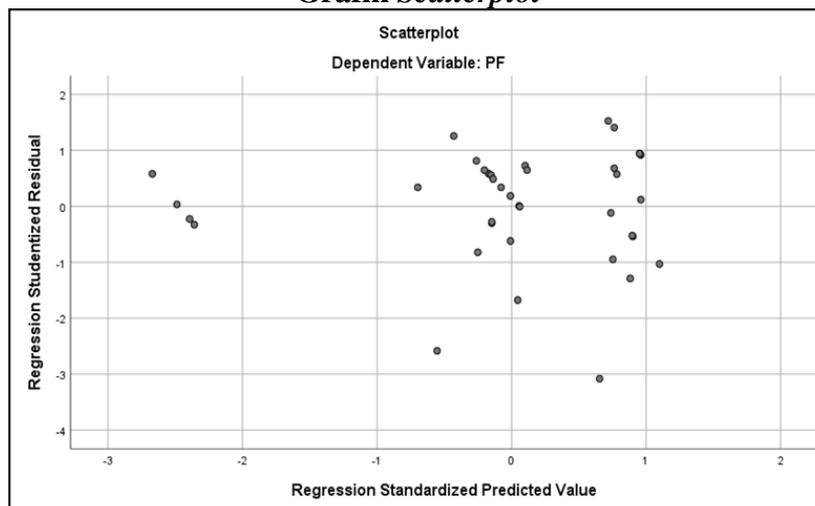
Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Tolerance* yang lebih besar dari 0.10 dan nilai *VIF* nya lebih kecil dari 10 maka bebas multikolinieritas

4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi yang digunakan terdapat ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Apabila terdapat ketidaksamaan, maka disebut heterokedastisitas, sedangkan bila varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas. Prasyarat yang harus dapat terpenuhi dalam model regresi yaitu tidak terjadinya gejala heterokedastisitas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara melihat grafik scatterplot. Grafik scatterplot dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3
Grafik Scatterplot



Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan grafik *scatterplot* diatas, maka dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan data menyebar secara acak diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi yang digunakan pada penelitian ini.

4.8 Hasil Uji T

Pada uji hipotesis ini terdapat 3 model pengujian. Model pertama digunakan untuk menguji audit sektor publik terhadap pencegahan *fraud*, model kedua digunakan untuk menguji kompetensi auditor internal terhadap pencegahan *fraud*, model ketiga digunakan untuk menguji keadilan organisasional terhadap pencegahan *fraud*. Uji statistik t atau uji parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel yang diuji. Berdasarkan pada tabel dibawah ini, maka hasil uji statistik t untuk masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Statistik T
Coefficients^a

| Variabel | Standardized Coefficients Beta | Nilai t | Sig | Keterangan |
|--------------------|--------------------------------|---------|------|------------------|
| ASP | 0,391 | 3,033 | .005 | Signifikan |
| KAI | 0,218 | 2,140 | .040 | Signifikan |
| KO | 0,016 | 0,406 | .687 | Tidak Signifikan |
| t _{table} | 1.685 | | | |

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan mengenai hasil uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independent. Untuk pengujian hipotesis pada variabel audit sektor publik. Pada hasil olah data yang telah dilakukan, dapat dilihat dan diketahui bahwa variabel ASP berpengaruh signifikan pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Hal tersebut dipertegas oleh nilai t hitung sebesar 3,033, yang menunjukkan bahwa t hitung > t tabel (3,033 > 1.685) sehingga hasil olah data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa audit sektor publik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sehingga hipotesis pertama **diterima**.

Pengujian hipotesis yang kedua pada variabel kompetensi auditor internal terhadap pencegahan *fraud*. Pada tabel 9, menunjukkan hasil olah data yang telah dilakukan bahwa variabel kompetensi auditor internal berpengaruh pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai signifikansi sebesar 0,040. Hal tersebut dipertegas oleh t hitung sebesar 2,140 yang menunjukkan bahwa t hitung > t tabel (2,140 > 1.685) sehingga hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sehingga hipotesis kedua **diterima**.

Pada pengujian hipotesis yang ketiga pada variabel keadilan organisasional terhadap pencegahan *fraud*. Pada tabel 9, menunjukkan hasil olah data yang telah dilakukan bahwa variabel keadilan organisasional tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai signifikansi sebesar 0,687. Hal tersebut dipertegas oleh nilai t hitung sebesar 0,406, yang menunjukkan bahwa t hitung < t tabel (0,406 < 1.685) sehingga hasil olah data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa keadilan organisasional tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sehingga hipotesis ketiga **ditolak**.

4.9 Hasil Uji F

Uji F untuk menguji apabila variabel bebas atau independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan dengan variabel terikat atau dependen. Uji f ini dilakukan dengan kriteria apabila p value (sig) < 0.05, maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10
Hasil Uji F

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 369.078 | 3 | 123.026 | 73.860 | .000 ^b |
| | Residual | 56.633 | 34 | 1.666 | | |
| | Total | 425.711 | 37 | | | |

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Hasil pengujian diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan tingkat signifikan sebesar 0,05. Hasil pengujian tersebut juga menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ($73,860 > 1.685$). Berdasarkan pada hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Audit Sektor Publik, Kompetensi Auditor Internal dan Keadilan Organisasional secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Pencegahan Fraud.

4.10 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa besar peran variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dalam model yang digunakan dalam penelitian. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam peneltian mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dari variabel dependen (SITASI). Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11
Hasil Uji R^2

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .931 ^a | .867 | .855 | 1.291 |

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Hasil analisis koefisien determinasi di atas, adalah sebesar 0.943. Hasil ini dapat diartikan bahwa besarnya variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 85,5%. Sementara sebesar 14,5% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian.

4.11 Pembahasan

Pengaruh Implementasi Audit Sektor Publik terhadap Pencegahan *Fraud*

Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Audit Sektor Publik terhadap Pencegahan Fraud. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Audit Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud (H1) diterima. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa bahwa implementasi audit sektor publik berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini dapat di dukung oleh teori yang di kemukakan oleh (Riduwan, 2007) yang mana mengatakan bahwa Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Sedangkan audit sektor publik adalah suatu kontrol atas organisasi pemerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Auditornya adalah auditor pemerintah.

Hal ini dapat dijustifikasi bahwa yang dapat dilakukan audit sektor publik di lingkungan Kota Jayapura dimana setiap program kegiatan yang dilaksanakan setiap instansi di Kota Jayapura dapat dipantau dan diawasi secara baik oleh Inspektorat Kota Jayapura dalam hal ini adalah dengan melakukan pengaduitan terhadap kinerjanya. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara mengaudit keuangannya dan juga audit terhadap kepatuhannya sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam setiap kegiatan yang di lakukan pada organisasi di Kota Jayapura.

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa bahwa implementasi audit sektor publik berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi audit sektor publik akan membantu Inspektorat Kota Jayapura dalam pencegahan fraud, apabila implementasi audit sektor publik kurang memadai maka pencegahan fraud di Inspektorat Kota Jayapura

kurang berkualitas, sebaliknya implementasi audit sektor publik baik dalam menjalani setiap program yang telah ditentukan maka pencegahan fraud di Inspektorat Kota Jayapura dikategorikan sangat baik. Hal ini dapat di dukung oleh Teori keadilan yang di kemukakan oleh John Rawls (1921) mengatakan bahwa keadilan dalam organisasi berawal dari pemahaman untuk menguji prinsip-prinsip interaksi sosial secara umum, bukan secara khusus pada organisasi. Pernyataan di atas dapat di dukung oleh kajian (Ilfan Bereki, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Audit Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud.

Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Pencegahan *Fraud*

Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Kompetensi Auditor Internal terhadap Pencegahan Fraud. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Auditor Internal berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud artinya (H2) diterima.

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa kompetensi auditor internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi auditor internal merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seorang auditor dalam mencegah terjadinya fraud. Kompetensi auditor internal dalam penelitian ini diukur dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Webster's Ninth New Collegiate Dictionary (1983) dalam lastanti (2005) mendefinisikan kompetensi sebagai ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat keterampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman.

Hal ini dapat dijustifikasi bahwa kompetensi yang dimiliki auditor pada Inspektorat Kota Jayapura dimana sudah mempunyai pengetahuan yang baik dan juga diikuti dengan keterampilan dalam mengaudit, sehingga pada beberapa tahun belakangan ini Pemerintah Kota Jayapura mendapatkan opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Torehan penilaian ini semua tidak terlepas dari kompetensi yang di miliki oleh auditor pada Inspektorat Kota Jayapura. Pernyataan di atas dapat di dukung oleh kajian (Ilfan Bereki, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Auditor Internal berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud.

Pengaruh Keadilan Organisasional terhadap Pencegahan *Fraud*

Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu Keadilan Organisasional tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud sehingga (H3) ditolak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan organisasional tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Keadilan Organisasional memfokuskan pada tiga isu utama untuk menilai istilah keadilan dalam organisasional. Ketiga isu yang dimaksud yaitu : hasil (outcomes), proses (process), dan interaksi antar personal (interpersonalinteractions). Penilaian yang berkaitan dengan kewajaran hasil atau kewajaran pengalokasian disebut dengan istilah keadilan distributif atau dengan kata lain keadilan distributif mengacu pada kewajaran yang diterima. Isu kedua dalam kewajaran organisasi yaitu penilaian yang mengacu pada elemen-elemen proses, yang diistilahkan sebagai keadilan prosedural. Keadilan prosedural mengacu pada proses bagaimana suatu keputusan diambil. Selanjutnya isu ketiga yaitu penilaian terhadap kewajaran mengenai hubungan antar personal yang disebut sebagai keadilan interaksional.

Hal ini dapat dijustifikasi bahwa yang menjadi alat ukur untuk melihat keadilan organisasional Inspektorat Kota Jayapura, adalah seorang auditor pada setiap Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura di setiap kegiatan dan proogram yang di jalankan. Hal lain juga terlihat ketika diaudit oleh auditor, inspektoran sebagai pengawas interen pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan melihat sikap adil yang dilakukan oleh auditor pada setiap organisasi di lingkungan Kota Jayapura sudah berjalan sesuai dengan SOP. Sehingga, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat tindakan *fraud* yang terjadi di lingkungan Kota Jayapura. Namun, dapat diketahui juga bahwa setiap orang tidak akan pernah merasa puas. Sikap adil atau tidak adil yang diterapkan dalam organisasi bukan menjadi alasan bagi auditor untuk tidak melakukan kecurangan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudarmo, 2008) dalam (Pristiyanti, 2012) yang menyatakan bahwa tindakan fraud akan tetap terjadi karena adanya faktor keserakahan yang dimiliki oleh setiap individu. Hasil tersebut juga didukung oleh teori keadilan yang menjelaskan bahwa keadilan dalam organisasi berawal dari pemahaman untuk menguji prinsip-prinsip interaksi sosial secara umum, bukan secara khusus pada organisasi. Melalui teori tersebut, mengakibatkan adanya persepsi bahwa manusia tidak pernah merasa puas, memberikan asumsi bahwa adil atau tidaknya suatu keadilan organisasi yang diterapkan dalam sebuah organisasi atau pemerintahan bukanlah menjadi alasan bagi para karyawan untuk tidak melakukan tindakan kecurangan. Pernyataan di atas dapat di dukung oleh kajian (Ilfan Bereki, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadilan Organisasional berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*.

Pengaruh Audit Sektor Publik, Kompetensi Auditor Internal, dan Keadilan Organisasional terhadap Pencegahan *Fraud*

Hasil dari hipotesis keempat (H4) penelitian ini menunjukkan bahwa Audit Sektor Publik (ASP), Kompetensi Auditor Internal (KAI), dan Keadilan Organisasional (KO) terhadap Pencegahan *Fraud* (PF). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Audit Sektor Publik (ASP), Kompetensi Auditor Internal (KAI), dan Keadilan Organisasional (KO) terhadap Pencegahan *Fraud* (PF) berpengaruh signifikan positif terhadap Pencegahan *Fraud* (PF). Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Pencegahan *Fraud*, sehingga H4 diterima. Pernyataan di atas dapat di dukung oleh kajian (Ilfan Bereki, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Audit Sektor Publik, Kompetensi Auditor Internal dan Keadilan Organisasional berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*.

Menurut (Mulyadi, 2002) mengukur kompetensi dapat menggunakan indikator sebagai berikut: Pengetahuan dan Pengalaman. Keadilan organisasional lebih menekankan pada kewajaran alokasi sumber daya, kewajaran proses pengambilan keputusan, dan kewajaran atas pemeliharaan hubungan antar pribadi atau informal *interaction* antara karyawan yang menerima keputusan dengan pembuat keputusan. Didukung oleh Teori keadilan yang mengatakan bahwa keadilan dalam organisasi berawal dari pemahaman untuk menguji prinsip-prinsip interaksi sosial secara umum, bukan secara khusus pada organisasi. Dengan suatu teori tersebut mengakibatkan adanya persepsi bahwa manusia tidak pernah merasa puas, memberikan asumsi bahwa adil atau tidak suatu keadilan organisasi yang diterapkan dalam sebuah organisasi atau pemerintahan bukanlah menjadi alasan bagi para karyawan untuk tidak melakukan tindakan kecurangan. Variabel ini menggunakan sebelas item pertanyaan terkait dengan keadilan procedural dan keadilan distributif yang diukur dari kebijakan dan peraturan organisasi, kejujuran, konsistensi, keetisan, keterwakilan, penghargaan dan tanggung jawab kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Audit sektor publik, kompetensi auditor internal dan Keadilan Organisasional berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang sejalan.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji, menganalisis dan mengetahui apakah Audit Sektor Publik, Kompetensi Auditor Internal, dan Keadilan Organisasional berpengaruh secara parsial ataupun simultan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Inspektorat Kota Jayapura. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit Sektor Publik berpengaruh signifikan pada tingkat signifikan 0,05 dengan nilai signifikan sebesar 0,005. Nilai signifikansi $< 0,05$ menunjukkan bahwa Audit Sektor Publik memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* di pemerintah daerah Kota Jayapura.
2. Kompetensi Auditor Internal berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Dapat dilihat dan diketahui berdasarkan tingkat signifikan 0,05 dan nilai signifikansi sebesar 0,040. Hal

tersebut menunjukkan Kompetensi Auditor Internal berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Jayapura.

3. Keadilan Organisasional berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Jayapura. Dapat dilihat dan diketahui berdasarkan tingkat signifikan 0,05 dan nilai signifikan sebesar 0,687. Nilai signifikansi $> 0,05$ menunjukkan bahwa Keadilan Organisasional tidak memiliki pengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Jayapura.
4. Audit Sektor Publik, Kompetensi Auditor Internal, dan Keadilan Organisasional secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud* Kota Jayapura dengan menunjukkan hasil nilai signifikan sebesar 0,000.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada inspektorat kotaJayapura untuk lebih mengefektifkan dan meningkatkan keadilan organisasional karena memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pencegahan terjadinya suatu tindakan *fraud*.
2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel independen lainnya guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*. Misalnya seperti, kompensasi dan moralitas individu.
3. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah dan memperluas sampel dan populasi penelitian salah satunya di Kabupaten/Provinsi Papua.
4. Bagi Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura, diharapkan dapat mendukung upaya inspektorat dalam pencegahan *fraud*, agar dapat menciptakan kondisi keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel dan informatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, S. G. (2013a). Implementasi Audit Sektor Publik dalam Pencegahan Fraud pada Inspektorat Kota Bima. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*.
- Ahmad, dkk. 2011. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah : Studi Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman Sumatera Barat". Politeknik Negeri Padang.
- Ambarwati, S. G. (2013b). IMPLEMENTASI AUDIT SEKTOR PUBLIK DALAM PENCEGAHAN FRAUD PADA INSPEKTORAT KOTA BIMA. *Universitas Negeri Surabaya*.
- Amelia, Lisa, 2013, Pengaruh Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kecurangan (Studi Empiris pada Kantor Cabang Utama Bank Pemertintah Kota Padang)", Universitas Negeri Padang.
- Amrizal. 2004. *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan oleh Auditor*. Bandung : Alfabeta
- Amrizal, 2004. Membangun Kultur dan Etika Internal Organisasi yang Anti Kecurangan. Direktorat Investigasi BUMD dan BUMD Deputi Bidang Investigasi. Makalah.
- Amrizal. 2004. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan oleh internal auditor diunduh dari <http://www.bpkp.go.id> Tanggal 02 Desember 2015 Jam 08.14 WIB.
- Aprilinda, R., & Islandsript. (2011). *Kursus Kilat Menguasai SPSS Untuk UKM*. Elex Media Komputindo.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Astri Furqani dan Hafidhah. 2015. Peranan Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam Mencegah dan Mendeteksi Fraud. Universitas Wiraraja Sumenep. Vol.V, No.1.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit
- Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Bharanti., B. E., Bonsapia., M., & Falah, S. (2020). DETERMINAN FAKTOR FRAUD DENGAN KEEFEKTIFAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi

- Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Keerom). *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset, Volume 3*, 12–29.
- Cooper, Donald R, dan P. S. S. (2006). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Cropanzano, R., Bowen, D.E. and Gilliland, S.W. (2007), “The management of organizational justice”, *Academy of Management Perspectives*, Vol. 21 No. 1, pp. 34-48.
- Efendy, Muh. Taufiq. 2011. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). *Tesis, Universitas Diponegoro. Semarang*
- Friska, Novanda. 2012. Pengaruh Profesionalisme Auditor Etika Profesi dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materealitas. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Furqani, A., & Hafidhah. (2015). Peranan Inspektorat Kabupatensumenep Dalam Mencegah Dan Mendeteksi Fraud Di Dinas Pendidikan Sumenep. *PERFORMANCE “ Jurnal Bisnis & Akuntansi,”* 5(1), 13–24. <https://doi.org/10.24929/feb.v5i1.126>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis SPSS program IBM SPSS 25 Edisi* (Badan Pene). Grafindo Persada.
- Ghozali, I. (2018). *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- <https://humas.jayapurakota.go.id>. (2020). Diakses pada tanggal 11 juli 2022 pukul 09.23 WIT.
- Ilfan siiti. 2020. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan APBD Dengan Transparansi Kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Dan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi*, Vol 3 , No 1.
- Lastanti, Sri. 2005. Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Atas Skandal Keuangan. *Media Riset Akuntansi, Auditing, Informasi* Volume 5 No. 1 April.
- Mariani. 2011. Anteseden dan Moderasi Kualitas Pengendalian Internal terhadap Hubungan antara Keadilan Organisasi dan Kinerja Karyawan. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang*.
- Mulyadi. (2002). *Auditing* (Edisi Keen). Salemba Empat.
- Nor, Wahyudin. 2011. Keadilan distributif Sebagai Variabel *Moderating* Dalam Hubungan Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Dinas. *Jurnal Investasi*. Vol. 7 No. 2 Desember 2011.Hal.109-118.
- Pristiyanti, Ika Ruly. 2012. Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai FaktorFaktor yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal* Volume 1, No 1, Agustus 2012.
- Priyatno, D. (2014). *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Penerbit ANDI.